



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SARIYANTO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS KECAMATAN**
3. NHK : **720740**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 560.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m²/100 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 222 m²/222 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 426 m²/115 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 156.450.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG KIJANG STANDARD Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA NF125 TD MT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.950.000
3. MOTOR, HONDA NC110A1C A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 11.900.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG KF 20 Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
5. MOTOR, HONDA NC110A1C A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 12.300.000
6. MOBIL, HONDA CITY SX8GM M/T Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 44.000.000
7. MOTOR, HONDA NC 110A1C A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.300.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 52.300.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	773.750.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	773.750.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.